

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Musi Banyuasin)

Mia Kusumawaty¹

miakusumawaty@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Palembang

Jumania Septariani²

jseptariani@gmail.com

STIE Rahmadiyah Sekayu

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of local government accounting systems, accounting understanding on the quality of government financial reports. This study uses primary data. Collecting data using the distribution of questionnaires. The population of this study is all SKPD in Musi Banyuasin Regency and the sampling method is carried out by the census method. The samples in this study were 23 SKPD. Each SKPD used 3 respondents so that the number of samples for this study were 69 respondents. The local government accounting system, accounting understanding of the quality of government financial statements were tested using hypothesis testing, namely the Coefficient of Determination Test, Partial Test, and Simultaneous Test using SPSS 24 software. Before testing the hypothesis, the data were first tested using the data quality test and classical assumption test. The results of this study were Local Government Accounting System, Accounting Understanding partially had a significant effect on the quality of the financial statements of the Musi Banyuasin district government. Local Government Accounting System, Accounting Understanding simultaneously had a significant effect on the quality of the financial statements of the Musi Banyuasin district government.

Keywords: *Local Government Accounting System, Accounting Understanding, Quality of Financial Reports*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk

mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sekecil mungkin campur tangan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan

sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Dalam proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah.

Sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu untuk dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya hal ini diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik.

Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu dari 16 kabupaten/kota yang ada di Sumatera

Selatan dengan ibu kota Kota Sekayu yang memiliki luas wilayah ±14.265,96 km² yang terbentang pada lokasi 1,3° - 4° LS, 103° - 105° BT. Beberapa tahun terakhir Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut (Tahun 2017-2020). Hal ini menyebabkan pemerintahan kabupaten Musi Banyuasin selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten. Konsistensi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana tercermin dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu topik yang menarik untuk diteliti mengenai faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kurangnya pemahaman dan kepedulian atas penerapan system akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku masih banyak terjadi di daerah-daerah yang terdapat di Indonesia. Di pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin jika tidak menerapkan atau

kurangnya kepedulian atas penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah serta pemahaman akuntansi yang kurang bagi aparatur pemerintah akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan baik agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Baik buruknya pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan laporan keuangan yang berkualitas sebagai gambaran bagaimana Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan telah melaksanakan kegiatan dalam lingkup pemerintahan daerah sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Kualitas merujuk pada pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu yang dinilai melalui hasil pertanggungjawaban suatu entitas. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan; menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah, menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap

anggarannya, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dibentuknya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk Akuntabilitas, Manajerial dan Pengawasan yang hasil akhir dari siklusnya adalah informasi keuangan. Pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja wajib dilakukan, meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.

Pemahaman Akuntansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020), paham diartikan sebagai pengetahuan banyak, pendapat, aliran haluan, pandangan,

pandai dan mengerti benar tentang suatu hal, sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses, cara perbuatan memahami dan memahamkan. Pemahaman individu itu sendiri dapat diukur dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap suatu objek misalnya pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas keseharian mereka, sehingga akan didapatkan suatu jawaban mengenai pemahaman dari seseorang terhadap pekerjaannya. Pemahaman aparat pemerintah diartikan sebagai suatu kemampuan dari seseorang pegawai/karyawan yang mengelola keuangan untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan kemudian menyusun informasi tersebut ke dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, adanya pemahaman aparat pemerintah adalah suatu hal yang sangat mempengaruhi, dimana jika pegawai mampu untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan mengerti dengan sumber yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan maka laporan yang

disusun dan disajikan akan sesuai dengan standar, akan berkualitas, dan relevan untuk pengambilan keputusan.

Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu penelitian Lumenta, dkk (2016), melakukan penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). Hasil penelitian menunjukkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan Ketaatan Peraturan Perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara simultan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasibuan (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pada SKPD Padang Lawas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan perlu adanya objek penelitian, begitu juga dengan penelitian ini. Objek Penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Desain Penelitian

Sanusi (2013:8), menyatakan bahwa desain penelitian dapat dikategorikan, yaitu: desain penelitian deskriptif, desain penelitian kausalitas, desain penelitian korelasional, desain penelitian tindakan, desain penelitian eksperimental, desain penelitian grounded. Desain penelitian dalam penelitian ini digolongkan kepada penelitian kausalitas, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara jelas dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel penyebab (X) dan variabel terikat (Y).

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer (*Primary Data*) berupa daftar pertanyaan yang langsung ditujukan kepada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun sumber data yang digunakan yaitu hasil wawancara berstruktur, yaitu Penulis bebas mewawancarai dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk

pengumpulan data. Penulis mendokumentasikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa struktur organisasi dan laporan lainnya yang dianggap perlu. Penulis juga mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden dengan tujuan untuk menganalisa dan mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi target populasi dalam penelitian ini adalah jarak yang berdekatan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan SKPD yang lainnya dan SKPD yang menerima atau yang bersedia untuk dijadikan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 34 SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang ada di kota Sekayu. Pengambilan sampel terhadap responden akan dilakukan secara *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan sehingga dapat mendukung penelitian. Dari 34 SKPD

di kota Sekayu yang menerima atau bersedia dijadikan penelitian berjumlah 23 SKPD, 11 SKPD tidak bersedia. Jadi total SKPD yang akan dijadikan sampel penelitian berjumlah 23 SKPD.

Kriteria responden yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD) serta fungsi akuntansi yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada periode penyusunan laporan keuangan. Alasan pemilihan responden adalah karena kepala bagian akuntansi/penatausahaan keuangan dan staf akuntansi bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD dan juga setiap bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi.

Penulis mengasumsikan setiap SKPD mengembalikan 3 (tiga) kuisisioner, dengan adanya jumlah SKPD sebanyak 23 SKPD, maka yang menjadiresponden sebanyak 69 orang. Penulis menggunakan alat analisis data yang diolah dengan software SPSS (*Statistical Product and Service*).

Operasionalisasi Variabel

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah diukur dengan instrumen 7 butir pernyataan yang sebelumnya sudah digunakan Suhartono & Solichin (2006) yaitu Kelancaran program, Pengukuran kinerja, Pelaksanaan anggaran, Indikator kinerja, Analisis keuangan, Pelaporan evaluasi dan jalannya program. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel dependen adalah kuesioener yang dikembangkan dari peneliti (Fatmala, 2014) yang berhubungan dengan variabel ini.

Variabel SAPD diukur dengan 6 butir pertanyaan yang sebelumnya sudah digunakan Sumiati (2012) dengan 3 indikator yaitu pencatatan, penggolongan, dan pelaporan. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel independen adalah

kuesioner yang dikembangkan dari peneliti (Fatmala, 2014) yang berhubungan dengan variabel ini.

Variabel Pemahaman Akuntansi diukur dengan indikator yaitu tingkat pemahaman terhadap komponen laporan akuntabilitas dan prinsip akuntansi serta tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur dalam laporan akuntabilitas. Referensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel independen ini adalah kuesioner yang dikembangkan dari penelitian (Fatmala, 2014) yang berhubungan dengan variabel ini. Dalam Kuisisioner penelitian ini menggunakan skala Likert Untuk mengukur variabel ini yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Musi Banyuasin. Teknik pengumpulan data

observasi digunakan untuk memperoleh data proses jalannya pengisian angket. penulis membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis kemudian dijawab oleh responden/sampling. Dan bentuk angketnya adalah angket tertutup, yaitu angket yang soal-soalnya menggunakan teknik pilihan ganda atau sudah ada pilihan jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dikehendaki. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis kuantitatif.

Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji hipotesis digunakan alat Analisis Regresi Berganda (*multiple regression*). Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variable independen. Persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

α = Konstanta

X1= Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

X2 = Pemahaman Akuntansi

b = Koefisien Regresi

$e = \text{Error Term}$, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *Adjusted* R^2 ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X . Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (*Adjusted* $R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila *Adjusted* $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X . Dengan kata lain bila *Adjusted* $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

Pengujian Hipotesis

Korelasi digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Fungsi utama dari uji korelasi adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ukuran yang menyatakan keeratan hubungan tersebut adalah koefisien korelasi atau sering disebut dengan korelasi person (*pearson product moment*). Rumus koefisien korelasi r Pearson adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \sqrt{n(\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

Dimana :

- r = korelasi pearson
- n = banyaknya pasangan pengamatan
- $\sum x$ = jumlah pengamatan variabel X
- $\sum y$ = jumlah pengamatan varibel Y

Pedoman untuk memberikan intepretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 1
Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi	Kriteria
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2015:87)

Nilai koefesien determinasi adalah antara nol dan satu nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel indenpendent dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependentnya. Rumus koefesien determinasi adalah sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X (kepuasan pelanggan) dan Y (pelayanan), apakah variabel X benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y secara parsial. Rumus uji signifikansi pengaruh (uji t) adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_{x-x}}$$

Keterangan :

T = nilai t hitung

\bar{X}_1 = rata-rata kelompok 1

\bar{X}_2 = rata-rata kelompok 2

S_{x-x} = standar error kedua kelompok

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

H_0 Penerapan Sistem Akuntansi : Pemerintah Daerah dan Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

H_a Penerapan Sistem Akuntansi : Pemerintah Daerah dan Pemahaman Akuntansi Tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Banyuasin.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data dan Pembahasan Statistik Deskriptif

Dari hasil kuisioner yang kembali diperoleh gambaran mengenai variabel penelitian yang dapat dilihat dari berikut :

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_X1	69	19	30	25,03	2,578
TOTAL_X2	69	25	40	33,41	3,418
TOTAL_Y	69	22	35	29,12	3,104
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data diolah, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2 diketahui partisipasi penyusunan anggaran dengan jumlah responden (N) sebanyak 69 responden.

1. Diketahui Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X_1) dengan jumlah responden (N) sebanyak 69 responden dengan nilai minimum adalah 19, nilai maksimum adalah 30, nilai rata-rata (mean) adalah 25,03 dan nilai Standar deviasi adalah 2.578.
2. Diketahui Pemahaman Akuntansi (X_2) dengan jumlah responden (N) sebanyak 69 responden dengan nilai minimum adalah 25, nilai

maksi-mum adalah 40, nilai rata-rata (mean) adalah 33.41 dan nilai Standar deviasi adalah 3.418.

- Diketahui kualitas laporan keuangan (Y) dengan jumlah responden (N) sebanyak 69 responden dengan nilai minimum adalah 22, nilai maksimum adalah 35, nilai rata-rata (mean) adalah 29.12 dan nilai Standar deviasi adalah 3.104.

Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 5\%$. Dasar pengambilan keputusan untuk Kolmogorov-Smirnov yaitu nilai value pada kolom Asymp. Sig (2-tailed) >level of significant ($\alpha = 5\%$).

Tabel 3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,60892821
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,073
	Negative	-,089
Test Statistic		,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.
 Sumber : Data diolah, Tahun, 2021

Perhatikan bahwa berdasarkan Tabel 3 diketahui nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0.200. Karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

Hasil Uji Multikolinearitas

Regresi yang bebas dari masalah multikolinearitas apabila mempunyai nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Uji multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF menunjukkan hasil seperti pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Uji Multikolineritas
Coefficients^a

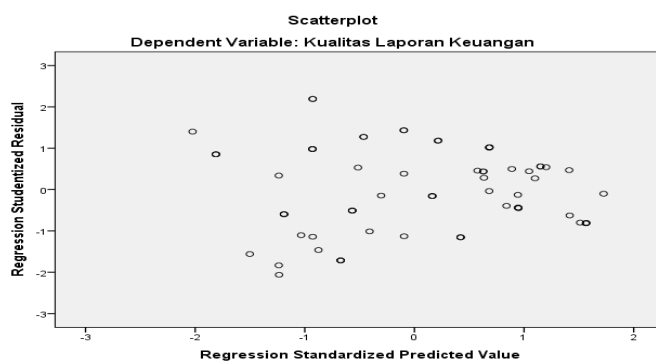
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	,967	1,034
Pemahaman Akuntansi	,967	1,034

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
 Sumber : Data diolah, Tahun 2021

Perhatikan bahwa berdasarkan Tabel 3 masing-masing nilai VIF tidak lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* diatas 0.1 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas, dapat dilakukan melalui analisis grafik dibawah.



Sumber : Data diolah, Tahun 2021

Gambar 1 Grafik Scatterplot

Gambar 1 menunjukkan bahwa titik-titik yang ada menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas. Oleh karena itu, model regresi dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda juga dapat diketahui nilai korelasi dan koefisien determinasinya, dimana nilai korelasi mencerminkan kekuatan hubungan antara variabel independen/bebas (variabel sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi) terhadap variabel dependen/terikat (kualitas laporan keuangan).

Tabel 5
Hasil Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,329 ^a	,108	,081	6,708

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sumber : Data diolah, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 5 nilai koefisien determinasi R² terletak pada kolom *R-Square*. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0.108. Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas kurang mampu dalam menjelaskan variabel dependen (kualitas laporan keuangan) sebesar 10,8%, sisanya sebesar 89,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji parsial (t-test) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen

secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji t. hipotesis statistik yang diajukan adalah:

H1 : $b_i \neq 0$: *variable independen* (bebas) berpengaruh secara parsial. Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis adalah:

1. H1 diterima apabila nilai probabilitas < *level of significant* sebesar 0,05;
2. H1 ditolak apabila nilai probabilitas > *level of significant* sebesar 0,05.

Dalam pengambilan keputusan hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai dari uji t

terhadap nilai kritis berdasarkan tabel distribusi t. Sebelum menghitung nilai kritis t, terlebih dahulu menghitung derajat bebas pembilang dan penyebut dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Derajat bebas pembilang} = k-1$$

$$\text{Derajat bebas penyebut} = n-k$$

Dalam hal ini n menyatakan jumlah elemen dalam sampel dan k menyatakan jumlah variabel. Derajat bebas pembilang adalah $k-1 = 4-1 = 3$ dan derajat bebas penyebut adalah $n-k = 69-4 = 65$. Maka nilai kritis t dengan derajat bebas pembilang sama dengan 3 (tiga) dan derajat bebas penyebut sama dengan 65 serta nilai tingkat signifikansi 5% adalah 1,993.

Tabel 6
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-.613	,569		-1,077	,285
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	1,295	,137	1,075	9,438	,000
Pemahaman Akuntansi	,080	,103	,088	2,774	,442

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data diolah, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen sebagai berikut :

1. Nilai signifikansi variabel sistem akuntansi pemerintah daerah

diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sedangkan nilai t tabel adalah 1,996 sehingga nilai uji T hitung > T tabel ($9,438 > 1,996$) maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi

pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$. Diketahui nilai koefisien regresi dari sistem akuntansi pemerintah adalah 9.438. Karena bernilai positif hal ini berarti variabel sistem akuntansi pemerintah memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan (berpengaruh positif) semakin naik sistem akuntansi pemerintah, maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan, pengaruhnya signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Nilai signifikansi variabel pemahaman akuntansi diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0.442 < 0.05$ sedangkan nilai t_{tabel} adalah 1.996 sehingga nilai uji $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,774 > 1.996$) maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa pemahaman akuntansi secara parsial berpengaruh dan signifikan

terhadap akuntabilitas kinerja pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$. Diketahui nilai koefisien regresi dari pemahaman akuntansi adalah 2.774. Karena bernilai positif, hal ini berarti variabel pemahaman akuntansi memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas kinerja (berpengaruh positif) semakin naik pemahaman akuntansi, maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan, pengaruhnya signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan F (uji-F) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai signifikan F dengan nilai signifikansi yaitu 0,05. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: $H_1 : b_0 = b_1 = b_2 \neq 0$: semua variabel independen

(bebas) berpengaruh secara bersama-sama. Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis adalah :

1. H_1 diterima apabila pada $\alpha = 5\%$ dan nilai probabilitas $< level\ of\ significant$ sebesar 0,05; dan
2. H_1 ditolak apabila pada $\alpha = 5\%$ dan nilai probabilitas $> level\ of\ significant$ sebesar 0,05.

Untuk pengambilan keputusan terhadap hipotesis, dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *F*hitung terhadap nilai kritis berdasarkan tabel distribusi *F*. Sebelum menghitung nilai kritis *F* terlebih dahulu menghitung derajat bebas pembilang dan penyebut dengan rumus sebagai berikut :

$$Derajat\ bebas\ pembilang = k - 1$$

$$Derajat\ bebas\ penyebut = n - k$$

Dalam hal ini, *n* menyatakan jumlah elemen dalam sampel dan *k* menyatakan jumlah variabel. Derajat bebas pembilang dalam penelitian ini adalah $k - 1 = 2 - 1 = 1$ dan derajat bebas penyebut adalah $n - k = 69 - 2 = 67$ Maka nilai kritis *F* dengan derajat bebas pembilang sama dengan 2 dan derajat bebas penyebut sama dengan 67 dengan nilai tingkat signifikansi 5% adalah 3,13. Berikut aturan

pengambilan keputusan hipotesis berdasarkan uji *F* :

- Jika nilai dari uji $F \leq$ nilai kritis *F*, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak; dan
- Jika nilai dari uji $F \geq$ nilai kritis *F*, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tabel 7
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressi on	640,029	2	320,015	1404,034	,000 ^b
	Residual	15,043	66	,228		
	Total	655,072	68			
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah						

Sumber : Data diolah, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 7 diketahui nilai *F*hitung adalah 1404,034, dengan nilai *F*tabel sebesar 3.13 sehingga *F*hitung $>$ *F*tabel (1404,034 $>$ 3.13) dan nilai signifikan 0.000 $<$ 0.05, maka disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas (sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Nilai koefisien determinasi R^2 terletak pada kolom *R-Square*. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar $R^2 = 0.108$. Nilai tersebut berarti seluruh variabel independen kurang mampu menjelaskan variabel akuntabilitas kinerja sebesar 10,8 %, sisanya sebesar 89,2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Hasil uji parsial variabel sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini dilihat dari nilai signifikansi variabel sistem akuntansi pemerintah daerah diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, maka hipotesis yang diajukan diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lumenta, J.Morasa, L.Mawikere (2016).

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Hasil uji parsial variabel pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini dilihat dari nilai signifikansi variabel pemahaman akuntansi diperoleh tingkat signifikansi sebesar $0.442 < 0.05$, maka hipotesis yang diajukan diterima.

Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan hasil uji simultan yang dilakukan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pemahaman Akuntansi berpengaruh secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hasil penelitian ini terlihat dari nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Sehingga Hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zirman, (2010), Riantiarno dan Azlina(2011), dan Lumenta, J.Morasa, L.Mawikere (2016).

Implikasi Hasil Penelitian

Penulis melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan sistem

akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Penulis menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD) serta fungsi akuntansi yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebanyak 69 kuesioner yang terdiri dari 23 SKPD dimana masing-masing SKPD mendapatkan 3 responden.

Penelitian tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pemahaman Akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah ini mempunyai implikasi yaitu bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Musi Banyuasin, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu perlu diterapkan sistem akuntansi

pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi. Semakin baik penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi maka tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah semakin baik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam kaitannya dengan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin hendaknya melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi. Dalam menjamin konsisten pelaporan keuangan daerah hendaknya SKPD Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Serta penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di masa mendatang.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain yaitu dari 34 SKPD yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Penulis hanya menyebarkan kuesioner pada 23 SKPD saja. Hal ini dikarenakan jarak dan lokasi SKPD yang tidak terjangkau. Variabel yang digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hanya penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi, padahal masih banyak variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN

Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi maka semakin tingginya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini hanya mengambil sampel 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga hasil penelitian belum dapat

digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk memprediksi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hanya penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi, padahal masih banyak variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pihak instansi terkait diharapkan dapat lebih meningkatkan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi agar tercapai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Dikarenakan aspek tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah SKPD di Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperbanyak jumlah responden agar dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmala, Juanita dan Baihaqi. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah). *Repository Universitas Bengkulu*.
<http://repository.unib.ac.id/id/eprint/8184>
- Hasibuan.2018. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pada SKPD Padang Lawas). *Repository Universitas Sumatera Utara*.
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5666>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta. PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan.
- Lumenta,A.L, J.Morasa, L.Mawikere, 2016. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA, Vol.4, Nomor 3, Hal 135-146*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Riantiarno, Azlina. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Volume 3 Nomor 3*. Penerbit Universitas Riau.
- Sanusi, Anwar. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketiga. Jakarta. Salemba Empat.
- Suhartono & Solichin. 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) Padang*.

<http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/6359>

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumiati. 2012. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Siak). Repositori Universitas Riau. <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/1727/Microsoft%20Word%20-%20jurnal%20sumiati.pdf;jsessionid=F2BB18FE8F1488E12417871F82E8B13D?sequence=1>

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Zirman, dkk. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan pada Peraturan

Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi*. Volume 18 Nomor 1. Penerbit Universitas Riau.